

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang dapat diukur dari aspek ekonominya dengan pendapatan nasional per kapita. Peningkatan pendapatan nasional terjadi melalui pertumbuhan ekonomi, diindikasikan oleh naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi, dan sebaliknya, pembangunan ekonomi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator keberhasilan perekonomian suatu negara, diukur dari kenaikan PDB. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan tingkat pengangguran, yang dapat menghambat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas perekonomian dengan tingkat pengangguran rendah, inflasi yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat merugikan perekonomian, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi penting, dan dampaknya tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada tingkat sosial ekonomi, politik, dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan peningkatan pengangguran, yang pada gilirannya dapat

merugikan perekonomian dan masyarakat. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, penurunan kesejahteraan, dan bahkan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk.

Masalah kemiskinan juga menjadi fokus pembangunan nasional, karena kemiskinan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kemiskinan menciptakan tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mengatasi kemiskinan, perlu ditekankan pada peningkatan standar hidup, pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

Pengangguran dan kemiskinan memiliki dampak negatif pada pembangunan ekonomi, dan untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kebijakan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian suatu Negara dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita masyarakatnya menunjukkan kecenderungan yang meningkat secara jangka panjang (Arsyad,1999:7). Peningkatan pendapatan per kapita dapat didorong dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sumber daya modal serta pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Bentuk nyata pembangunan ekonomi memberikan dampak pada kondisi sosial ekonomi yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi tenaga kerja dan pengangguran serta kemiskinan yang melanda masyarakat (Todaro,2000). Dalam mewujudkan harapan dari strategi tersebut, Kabupaten Nagekeo sebagai salah satu dari sekian banyak

pemerintahan daerah otonomi yang baru lahir, dituntut untuk mampu membangun dan mengembangkan segala potensi baik SDA, SDM dan potensi lainnya dalam berbagai sektor termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berfungsi sebagai indikator tidak langsung untuk menilai keberhasilan layanan yang disediakan pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan manusianya dapat diukur dengan sejauh mana upaya pembangunan difokuskan pada percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin dan pada saat yang sama meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan pencapaian IPM dapat diartikan sebagai peningkatan satu atau lebih komponen IPM, termasuk pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Tujuannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat mengakses pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Tabel 1.1.**  
**Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nagekeo**  
**Tahun 2010-2022(persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia %</b>
2010	60,19
2011	61,05
2012	61,60
2013	62,24
2014	62,71
2015	63,33
2016	63,93
2017	64,74
2018	65,35
2019	65,88
2020	65,81
2021	65,82
2022	66,22

*Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2010-2022*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas rata-rata indeks pembangunan manusia di kabupaten nagekeo 13 tahun terakhir dengan tingkat indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2022 sebesar 66,22 persen, dan indeks pembangunan manusia terendah pada tahun 2010 sebesar 60,19 persen. Dan indeks pembangunan manusia kabupaten nagekeo 13 tahun terakhir tidak stabil pada tahun 2010 sebesar 60,19 persen, pada tahun 2011 meningkat sebesar 61,05 persen, meningkat lagi pada tahun 2012 sebesar 61,60 persen, dan meningkat lagi tahun 2013 sebesar 62,24 persen, meningkat lagi tahun 2014 sebesar 62,71 persen, dan meningkat lagi tahun 2015 sebesar 63,33 persen, meningkat lagi pada tahun 2016 sebesar 63,93 persen, dan meningkat lagi tahun 2017 sebesar 64,74 persen, dan meningkat lagi tahun 2018 sebesar 65,35 persen, meningkat lagi tahun 2019 sebesar 65,88 persen dan menurun lagi di tahun 2020 sebesar 65,81 persen dan meningkat lagi di tahun 2021 sebesar 65,82 persen dan meningkat lagi tahun 2022 sebesar 66,22 persen.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pengangguran di Kabupaten Nagekeo**  
**Tahun 2010-2022(persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran (%)</b>
2010	1,51
2011	2,38
2012	1,62
2013	1,14
2014	2,56
2015	1,95
2016	3,25
2017	3,60
2018	1,88
2019	2,76
2020	3,09
2021	0,97
2022	2,97

*Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2010-2022*

Berdasarkan tabel 1.2 dari Badan Pusat Statistik, jumlah tingkat pengangguran tidak tetap setiap tahunnya. Di tahun 2010 sebanyak 1,51 persen, sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 2,38 persen, tahun 2012 menurun menjadi 1,62 persen, tahun 2013 menurun menjadi 1,14 persen, tahun 2014 kembali meningkat menjadi 2,56 persen, sedangkan tahun 2015 menurun menjadi 1,95 persen, di tahun 2016 kembali meningkat menjadi 3,25 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 3,60 persen, tahun 2018 menurun menjadi 1,88 persen, di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 2,76 persen, di tahun 2020 meningkat menjadi 3,09 persen, tahun 2021 menurun menjadi 0,97 persen dan di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 2,97 persen.

Perubahan yang terjadi di tingkat Provinsi NTT disebabkan oleh sejumlah faktor pendorong, seperti minimnya peluang pekerjaan, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk yang terlalu tinggi, yang bahkan dapat meningkatkan angka pengangguran yang ada. Hal ini karena para pengusaha atau perusahaan merasa terbebani oleh situasi tersebut. Oleh karena itu, dapat timbul kesulitan dalam memberikan upah kepada karyawan, atau dengan kata lain, mengalami defisit. Dampak tersebut juga akan dirasakan oleh pekerja atau karyawan.

Karenanya, kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, terutama di negara dengan jumlah penduduk yang tinggi yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Situasi ini lebih menonjol pada generasi muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan mereka dan mencari pekerjaan sesuai dengan minat mereka. Selain itu, penerapan undang-undang ketenagakerjaan dapat mendorong

para pengusaha untuk lebih banyak menggunakan tenaga kerja kontrak, yang kemudian dapat menjadi penyebab tambahan permasalahan pengangguran.

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagekeo**  
**Tahun 2010-2022 (Persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>
2010	12.70
2011	12.01
2012	12.16
2013	12.08
2014	12.02
2015	14.38
2016	13.61
2017	13.48
2018	12.98
2019	12.85
2020	12.61
2021	12.91
2022	12.05

*Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo 2010-2022*

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo selama 13 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 14,38%, sementara tingkat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 12,01%. Selama periode tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo tidak menunjukkan kestabilan. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan mencapai 12,70%, mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 12,01%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 12,16%. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 12,08%, kemudian terus fluktuatif hingga tahun 2022, dengan penurunan terakhir tercatat pada tahun 2022 sebesar 12,05%.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan melibatkan garis kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan

tingkat pengangguran. Di Provinsi NTT, garis kemiskinan selama 15 tahun terakhir juga mengalami variasi. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal. Salah satu definisi kemiskinan, seperti yang diemukakan oleh Todaro (2004), adalah kemiskinan absolut, di mana sejumlah penduduk tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nagekeo periode 2010-2022”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nagekeo” adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT tahun 2010-2022?
2. Apakah tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT tahun 2010-2022?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT tahun 2010-2022

#### **1.3.2. Manfaat**

1. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT tahun 2010-2022.

Memberikan masukan kepada pemerintah dan pelaku kegiatan ekonomi dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengaruh tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT tahun 2010-2022.